

BAB V

PENUTUP

Konflik Darfur mengarah pada krisis bermula pada bulan Februari 2003 ketika dua aliansi kelompok pemberontak, *Sudan Liberation Movement Army* (SLA) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) menyerang sejumlah instalasi militer milik pemerintah. Para pemberontak menuntut keadilan atas praktik marginalisasi ekonomi dan politik yang dialami Darfur. Di samping kepentingan-kepentingan di atas, serangan bersenjata yang dilakukan pemberontak ini juga bertujuan untuk melindungi komunitasnya dari serangan militan Arab Jenjaweed yang sering diuntungkan oleh adanya konflik ini.

Kondisi pemerintah Bashir yang saat itu masih dilanda krisis diantaranya konflik dengan pemberontak selatan, politik yang rawan akan kudeta, sertam rendahnya tingkat perekonomian akibat musim kering dan konflik berkepanjangan. Kondisi seperti ini membuat pemerintah Bashir mengupayakan penyelesaian konflik di wilayah Darfur dengan sebuah kebijakan rasional yakni dengan manajemen konflik.

Keputusan untuk melakukan manajemen konflik terhadap konflik di Darfur tidak lain karena didukung strategi *empiris rasional* serta *power coersive* digunakan

semakin gencar melakukan aksinya. Secara rasional keputusan pemerintah Bashir untuk memanajemen konflik di Darfur dengan memanfaatkan milisi (Jenjaweed), salah satunya didasarkan pada alasan keterbatasan personel militer serta keterbatasan infrastruktur pemerintah yang secara geografis masih banyak dikelilingi pegunungan dan padang pasir yang luas. Penggunaan milisi ini ternyata menimbulkan banyak distorsi dalam upaya penyelesaian konflik pemerintah dengan kelompok pemberontak. Setelah pemerintah berhasil mengajak pemberontak untuk bernegosiasi ternyata kelompok milisi Jenjaweed malah cenderung lebih bertindak agresif dalam melakukan aksi-aksinya dengan terus melakukan terror-teror terhadap warga Darfur, yang akhirnya membawa konflik ini kepada krisis kemanusiaan.

Gejala memburuknya kebijakan pemerintahan Bashir, diperparah dengan intervensi-intervensi dari pihak Asing dalam hal ini adalah Amerika dan Uni Eropa yang memanfaatkan PBB untuk melakukan embargo terhadap Sudan jika Pemerintah Bashir tidak mampu menyelesaikan konflik dengan melucuti senjata milisi Jenjaweed yang terkenal brutal dalam waktu 30 hari.

Intervensi asing ini, diduga karena Pemerintah Bashir terlalu lambat dalam merespon dampak dari manajemen konflik yang dilakukannya. Apalagi kemudian terungkap, pemerintah Sudan ikut memberi andil atas konflik. Manajemen konflik dan kebijakan mengadu domba yang dijalankan pemerintah telah membuat kaum pemberontak dibenturkan dengan kekuatan milisi. Maka muncul kekhawatiran, krisis

pasukan pemerintah masih memberikan angin kepada milisi dalam menghadapi kaum pemberontak, yang mulai angkat senjata Februari 2003.

Di samping alasan di atas jelas terlihat bahwasanya kebijakan intervensi pemerintah yang dilakukan dalam manajemen konflik Darfur tidak dilandaskan pada analisa yang cermat mengenai aktor-aktor kunci yang terlibat dalam konflik. Keterlibatan milisi dalam hal ini, semestinya dipandang perlu oleh pemerintah untuk bersama-sama bernegosiasi dengan kaum pemberontak mencari jalan keluar terbaik.

Upaya resolusi yang dilakukan pemerintah dengan pihak pemberontak masih berjalan seputar pelucutan senjata dan pemulihan keamanan. Upaya untuk memulihkan kepercayaan dan pengurangan prasangka atau persepsi buruk masing-masing aktor konflik, secara jelas belum menjadi prioritas utama Pemerintah Bashir. Sehingga dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan kelompok pemberontak tanpa peran serta milisi masih bersifat temporer. Kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan muncul masih dapat terjadi jika pemerintah Bashir tidak konsisten terhadap komitmennya dalam melucuti senjata milisi Jenjaweed serta kemauannya untuk memperbaiki kondisi yang semakin memburuk dan persepsi serta kepercayaan terhadap masing-masing aktor yang berkonflik.

Sukses tidaknya konflik yang dihadapi pada dasarnya sangat bergantung pada seberapa besar perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam mempertimbangkan sumber

yang akan diambil dapat dilaksanakan. Hal ini dimungkinkan karena masing-masing sumber konflik memberikan strategi yang berbeda dalam penyelesaiannya.

Dari sini terlihat, bahwa untuk sementara hipotesa penulis yang mengatakan bahwa "Kebijakan manajemen konflik dilakukan oleh pemerintah Omar Hasan Ahmad Al Bashir dalam kondisi krisis dengan memanfaatkan bantuan milisi bersenjata keturunan Arab (Jenjaweed). Kondisi terdesak membuat pemerintah Bashir memajemen konflik secara langsung dengan persiapan intervensi yang kurang cermat sehingga manajemen konflik yang dilakukan kontra produktif atau gagal" dapat dibenarkan.

Pelajaran penting dari kegagalan manajemen konflik Pemerintah Bashir ini dapat dijadikan sebagai bahan perenungan bagi aktor-aktor manajemen konflik lainnya sebelum mengambil sebuah keputusan dan menjalankan strategi-strateginya dalam mengelola konflik. Pelajaran penting ini adalah bahwa pemerintah atau aktor manajemen konflik harus cermat dan teliti dalam menganalisa konflik serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, strategi-strategi, ataupun kepentingan-kepentingan pihak yang terlibat dalam konflik sebelum menjalankan manajemen konfliknya. Agar hasilnya menjadi positif. Hal ini menjadi bahan pertimbangan khusus terutama bagi pemerintah-pemerintah di negara-negara berkembang dan dunia Islam yang saat ini masih banyak dilanda konflik dalam negeri yang cukup kompleks, seperti misalnya gerakan sparatisme, pemberontak maupun teroris.

Kegagalan Bashir dalam memajemen konflik di Darfur ini salah satunya

stabilnya proses demokrasi yang dilakukan oleh para elit penguasa sehingga memperparah konflik. Institusi negara yang tidak memiliki legitimasi di mata rakyat, tidak memiliki prosedur untuk memelihara akuntabilitas elite politik, serta kurangnya prosedur politik yang disepakati bersama untuk memproses tuntutan politik. Dalam keadaan ini, negara menjadi lemah, gagal atau bahkan terfragmentasi